

Busyro Muqoddas Pertanyakan, Siapa Bikin Tes ASN KPK?

JAKARTA (IM) – KPK menyebut semua materi pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang menjadi polemik disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan 4 instansi lainnya. Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mempertanyakan kompetensi 5 lembaga pembuat soal tes wawasan kebangsaan itu.

“Beberapa yang janggal tentang wawasan kebangsaan yang materi tesnya tadi sudah disebutkan dan itu dilakukan oleh lembaga negara Badan Intelijen, TNI Angkatan Darat, BNPT. Pertanyaannya apakah itu merupakan kebijakan Ketua KPK dan 4 pimpinan KPK yang lain atau ada pengaruh-pengaruh dari luar sehingga tes wawasan kebangsaan itu yang materinya justru mecehkan, bertentangan dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan yang konsepnya amat luhur di dalam 4 paragraf di pembukaan UUD 1945 itu justru dilakukan oleh lembaga negara yang tidak memiliki tradisi tidak memiliki kompetensi untuk wawasan kebangsaan,” kata Busyro, dalam konferensi pers yang disiarkan di JIB Post, Minggu (9/5).

Justru, menurut Busyro, lembaga yang kompeten melakukan tes wawasan kebangsaan tidak dilibatkan. Selain itu, ia mempertan-

yakan alasan akademisi tidak dilibatkan.

“Misalnya itu oleh Lemhannas, oke, misalnya kemarin Lemhannas di libatkan itu kompeten lembaga negara, seharusnya kampus dan lembaga-lembaga asesmen psikologi yang profesional itu dilibatkan sehingga dari sudut itu saja, bukan materi tesnya, tapi lembaga yang menangani seleksi wawasan kebangsaan ini lembaga yang dipertanyakan kompetensinya, tradisinya dan keterbukaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan isu Taliban di dalam tubuh KPK sehingga BNPT dilibatkan dalam pembuatan materi tes wawasan kebangsaan. Padahal, menurut Busyro, isu Taliban di KPK tidak ada.

“Isu itu antara lain dibarkannya bahwa KPK itu menjadi markas dari militansi Taliban, seakan-akan dikuasai oleh pegawai yang Islam saja, padahal saya bersaksi selama 4 tahun di sana dan sesudah itu saya terus menjalin hubungan yang sangat lekat di teman-teman KPK itu tidak ada militansi bernapas agama tertentu itu tidak ada, sama sekali tidak ada, lintas agama di sana itu kompak banget, itu Kristen yang saleh, Hindu yang saleh, muslim yang saleh, Buddha yang saleh,” ungkapnya. ● han

Waspada Penipuan Bermodus Sumbangan Mengatasnamakan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai penggalangan dana bermodus sumbangan Wakaf Lailatul Qadar atas nama KPK.

Berdasarkan informasi yang diterima, modus penipuan itu dilancarkan dengan mengutip nama lembaga serta pejabat KPK.

“Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi tentang adanya pihak yang mengatasnamakan KPK dan pejabat KPK untuk meminta sumbangan dengan berkedok Wakaf Lailatul Qadar melalui rekening sebuah bank,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan resminya, Minggu (9/5).

Ali menekankan, KPK secara kelembagaan maupun individu pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas), hingga para pegawai, dilarang untuk meminta sumbangan. Tak

hanya itu, Ali memastikan KPK tidak pernah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penggalangan dana.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi berulang kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pimpinan, dewan pengawas dan pegawai komisi,” ujar Ali.

Ali meminta masyarakat juga berperan aktif melaporkan ke aparat penegak hukum bilamana terdapat pihak yang mengaku bagian dari KPK dan kemudian meminta sumbangan. Masyarakat juga bisa langsung menghubungi call center KPK.

“KPK mengimbau masyarakat selalu waspada dan bila mendapatkan informasi sejenis, dapat mengonfirmasi melalui call center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id,” tuturnya. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



WARGA NEGARA KANADA DIDEPORTASI

Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) mewanti-wanti warga negara Kanada Christopher Kyle Martin (kiri) yang akan deportasi saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, Minggu (9/5/2021). Warga negara Kanada tersebut dideportasi pada Minggu (9/5) pukul 15.20 WITA menyusul viralnya promosi dan informasi di media mainstream maupun media elektronik tentang rencana kegiatan Yoga di Bali bertajuk Tantric Full Body Orgasm karena kegiatan itu bertentangan dengan kebudayaan Indonesia khususnya Bali yang memegang teguh adat istiadat dan norma agama.

Soal-Soal dalam TWK Pegawai KPK Dianggap Ngawur dan Tak Profesional

Sejumlah pertanyaannya TWK kepada Pegawai KPK dinilai mengarah pada aspek-aspek seksis dan diskriminatif. Sebab itu, Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta agar mendalaminya.

JAKARTA (IM) – Ketua Lapsesdam PBNU Rumadi Ahmad menilai, sejumlah soal yang muncul di dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti oleh pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak profesional dan mengarah kepada ranah personal.

Pasalnya, di dalam proses TWK itu, muncul sejumlah

pertanyaan seperti terkait dengan pilihan kenapa belum menikah, apakah melaksanakan Sholat Qunut, hingga tanggapan tentang pernikahan beda agama.

“Pertanyaan-pertanyaan wawancara tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan ini ngawur, tidak profesional dan mengarah kepada personal (private affairs) yang bertentangan den-

gan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945,” jelas Rumadi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (9/5).

Rumadi menduga materi pertanyaan TWK digunakan untuk mengincar para pegawai KPK yang diwawancarai “Mencermati cerita-cerita dari pegawai KPK yang diwawancarai terkait cara, materi dan durasi waktu wawancara yang berbeda-beda tampak terdapat unsur kesengajaan untuk menargetkan pegawai KPK yang diwawancarai,” ujarnya.

Pada aspek inilah, Rumadi menyebut bahwa TWK lebih mirip dengan penelitian khusus yang dilakukan pada era Orde Baru.

“Di sinilah, wawancara TWK tampak sebagai screening atau lisis zaman Orde Baru atau mihnah pada masa khilafah abbasiyah, yakni ujian keyakinan yang ditujukan kepada para ulama, ahli hadis, dan ahli hukum sehubungan dengan permasalahan kemaklukan al-Quran,” paparnya.

TWK akhirnya, lanjut Rumadi, digunakan untuk menyinkronkan sejumlah pegawai

KPK yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam banyak pihak yang terlibat korupsi. “Jika ini terjadi, maka ini adalah ancaman yang sangat serius terhadap peleman dan pelumpuhan KPK yang justru dilakukan oleh pihak internal KPK dan Pemerintah sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Rumadi mengatakan bahwa pelaksanaan TWK sebenarnya bisa dipahami untuk mencari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nasionalis dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

Namun, jika sejumlah pertanyaannya justru mengarah pada aspek-aspek seksis dan diskriminatif maka ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan untuk mendalami temuan tersebut.

“Meminta kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme, dan pelanggaran yang lain yang dilakukan pewartawacara kepada pegawai KPK yang diwawancarai,” ungkap Rumadi. ● han

Ingat, Hanya Akitivitas Esensial yang Boleh Melintas Saat Larang Mudik

JAKARTA (IM) – Kementerian Perhubungan kembali mengingatkan hanya aktivitas esensial yang boleh melintas saat larangan mudik lebaran 2021.

“Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan,” kata Adita dilansir dari instagram @jktinfo, Minggu (9/5).

Ia menambahkan bahwa transportasi darat berupa angkutan umum serta kereta api tetap akan melakukan pelayanan dengan jam operasionalnya akan dikurangi. Selain itu, akan ada pembatasan frekuensi mobilitas angkutan, dan membatasi

jumlah armada dengan menerapkan protokol kesehatan.

Adapun aktivitas esensial merupakan hal pelayanan serta objek-objek vital di masyarakat seperti sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi.

Kemudian keuangan, perumahan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis.

“Pelayanan dasar, dan objek vital dan beberapa sektor sosial ekonomi pendukung seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan sektor seni-sosial-budaya, tetap boleh beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat.” tegasnya. ● han

Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Sunan Kalijaga ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Diaz Hendropriyono.

Sunan mengatakan, dutaannya dari Ketua Penasehat PKPI AM Hendropriyono menambah semangatnya untuk memimpin PKPI.

“Dan tadi malam dalam acara silaturahmi, saya sampaikan (ke AM Hendropriyono) apabila itu menjadi satu perintah menjadi Ketua PKPI definitif, saya siap melaksanakan,” ujarnya.

Sunan mengatakan, dirinya ditunjukkan sebagai Plt Ketua Umum dalam rapat harian partai bersama 34 pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)

PKPI, Sabtu (8/5). Rapat harian tersebut juga memutuskan menerima pengunduran diri Diaz Hendropriyono sebagai Ketua Umum PKPI.

Kemudian, hasil rapat harian partai tersebut disampaikan dalam rapat pleno untuk disetujui dan disosialisasikan kepada seluruh DPP PKPI di seluruh Indonesia.

“Lalu setelah rapat pleno kita bawa hasil tersebut, kita sampaikan ke para ketua DPP PKPI di seluruh Indonesia untuk disosialisasikan,” ucapnya.

Sunan mengatakan, partainya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan dirinya sebagai Ketua Umum definitif PKPI, yang akan digelar setelah Lebaran 2021.

“Kita Munaslub setelah Lebaran dalam rangkaian silaturahmi juga. Namun demikian kami tetap mengikuti aturan dan anjuran pemerintah terkait proses,” kata Sunan.

Adapun penunjukkan Sunan menjadi Plt Ketua PKPI disampaikan Diaz Hendropriyono, yang sebelumnya menjabat Ketua Umum PKPI. “Sunan menjadi Plt Ketua PKPI. Setelah Lebaran akan diadakan munaslub,” ujar Diaz, Minggu.

Diaz tidak merinci lebih lanjut alasan memilih Sunan. Namun, ia menekankan bahwa partainya membutuhkan penyegaran. Menurut dia, sosok Sunan Kalijaga akan memberikan pemikiran dan gagasan baru terhadap PKPI.

“Pastinya begitu (penyegaran). Sebagai organisasi, tentunya perlu ada pemikiran-pemikiran baru,” katanya. ● han

IDN/ANTARA



PEKERJA MIGRAN JALANI KARANTINA DI MADIUN

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berada di dalam kamar karantina di Shelter Isolasi Kolektif Penanganan COVID-19, Jiwana, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (8/5). Shelter isolasi tersebut saat ini menampung tujuh orang PMI yang pulang dari Malaysia, Hongkong dan Dubai (Uni Emirat Arab) untuk menjalani karantina sebelum pulang ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Putusan MK Dianggap ‘Ngerjai’ Parpol Nonparlemen

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IR) Ujang Komaruddin menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjerai partai nonparlemen.

Pasalnya, putusan MK tersebut membuat partai kecil terkucilkan karena harus kembali melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Sementara Parpol yang telah lolos verifikasi 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019, hanya verifikasi administrasi saja.

“Cenderung dikerjai sehingga membuang energi yang orang atau partai lain tak mengeluarkannya,” kata

Ujang dalam keterangannya, Minggu (9/5).

Dia menilai, politik memang selalu terkesan tidak adil. Namun, lanjut dia, putusan MK tetap harus diterima meskipun keputusan tersebut membuat partai-partai besar bersuka cita penuh kemenangan. Sedangkan partai baru harus mengatur nafas agar bisa lulus verifikasi administrasi dan faktual KPU.

Ujang mengaku prihatin terhadap partai baru maupun kecil karena keputusan MK tersebut harus dihadapi dengan bertempur terlebih dahulu dengan verifikasi di lapangan sebelum mengikuti Pemilu. “Partai-partai kecil, belum jalan bertempur saja harus sudah menghadapi verifikasi ulang KPU,” tandasnya. ● mei

Buron Kerusuhan Papua 2019 Victor Yeimo Ditangkap

JAKARTA (IM) - Satgas Nembangawi menangkap Victor Yeimo buron kasus kerusuhan di Papua tahun 2019 lalu. Victor ditangkap pada Minggu (9/5) di Jayapura, Papua.

“Satgas Gakkum Nembangawi Berhasil Menangkap DPO aktor Kerusuhan Papua 2019, Victor Yeimo. Ditangkap hari ini 9 Mei 2021 jam 19.15 WIT di Jayapura,” kata Kasatgas Humas Nembangawi Kombes M Iqbal Alqudussy, Minggu (9/5).

Victor masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 2019 lalu. Dia disangka melakukan makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan

keonaran di masyarakat. “Kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap dan atau penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan dan atau pembakaran dan atau pencurian dengan kekerasan dan atau bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang/barang dan atau membawa senjata tajam tanpa izin,” papar Iqbal.

Victor dinyatakan sebagai tersangka aktor kerusuhan berdasarkan keterangan saksi yang menyebutnya sebagai pemimpin demo dan orator yang berorasi mengenai Papua merdeka dan memprovokasi masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

Selain itu, dia juga dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan keterangan ahli. “Saat ini tersangka Victor Yeimo dalam pemeriksaan di Mapolda Jayapura,” kata Iqbal.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 lalu, rentetan kerusuhan terjadi di Papua. Kerusuhan itu buntut kasus rasial yang kemudian memicu demo di Papua. ● mei

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN RENCANA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (“PERSEROAN”)

Dengan merujuk pada iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS LB”) yang diterbitkan di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 23 April 2021, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa rencana penyelenggaraan RUPS LB yang semula akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, dibatalkan.

Dengan pembatalan ini, maka pengumuman RUPS LB yang telah diiklankan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 10 Mei 2021
Direksi
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

ANNOUNCEMENT OF CANCELLATION OF THE PLAN TO HOLD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (“COMPANY”)

In reference to the notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGMS”) which was published in Harian Ekonomi Neraca newspaper on 23 April 2021, the Board of Directors of the Company hereby announces that the EGMS which was initially planned to be held on Monday, 10 May 2021, is cancelled.

With this cancellation, the EGMS announcement which had been published as mentioned above is hereby declared invalid.

Thus this announcement is conveyed to the shareholders of the Company.

Jakarta, 10 May 2021
Board of Directors
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

PENGUMUMAN

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 06 Mei 2021 No. 14, PT. Kusuma Alam Sari telah menyetujui RUPS LB dengan keputusan agenda utama :
- Perubahan Anggaran Dasar/peningkatan modal dasar dan ditetapkannya perseroan menjadi sebesar Rp 325.000.000.000,-
- Perubahan jenis Perseroan menjadi PMA;
- Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
- Dirut : Tn. Jacob Husin
- Direktur : 1. Tn. Hong Chia Chen
2. Tn. Jeffrey Susanto
3. Tn. Roeman Nilam
- Komut : Ny. Lim Li Hwa
- Komisaris : 1. Tn. Budjuwono Handjaja
2. Nn. Carissa Vicky Wijaya
Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PT. KUSUMA ALAM SARI
Direksi